

**SKRIPSI**

kk  
AM 07/02  
aul  
p

*JUNI ASMORO WULANDARI*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
YANG DI PHK SECARA MASSAL  
PADA PERUSAHAAN PAILIT**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

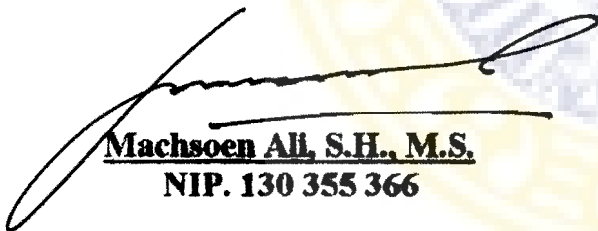
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
YANG DI PHK SECARA MASSAL  
PADA PERUSAHAAN PAILIT**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**

**Penyusun,**



**Juni Asmoro Wulandari**  
**NIM. 039814685**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada Bab – bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

- a. Dengan dipailitkannya perusahaan oleh putusan Hakim Pengadilan Niaga, maka secara otomatis aktifitas dari perusahaan menjadi berhenti, dan pekerjanya mengalami pemutusan hubungan kerja, baik secara massal maupun perorangan. Untuk segala permasalahan perusahaan, termasuk PHK diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan ( kurator ).
- b. Dalam hal pemenuhan hak – hak normatif pekerja akibat adanya kepailitan, digunakan dasar perangkat hukum berupa Kepmennaker No. 150/ 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Kepmennaker No. 150/ 2000 tersebut menentukan, bagi pekerja yang terkena PHK massal karena pailit mendapatkan hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi dengan besar yang sudah ditentukan, tetapi hak tersebut dimungkinkan dapat berkurang, asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak.

sebagai berikut :

- a. Kondisi pailit memang bukanlah suatu hal yang diinginkan semua pihak, tetapi jika memang sudah terjadi, hendaknya pekerja sebagai pihak yang tidak memiliki *bargaining power* tetap mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Seharusnya UU Kepailitan perlu ditinjau kembali, karena tidak melindungi pekerja jika budel pailit tidak mencukupi. Selain itu Kepmennaker No. 150/ 2000 perlu juga ditinjau kembali/ direvisi untuk melengkapi pengaturan mengenai pemenuhan hak bagi pekerja yang di PHK secara massal pada perusahaan pailit, jika budel pailit tidak mencukupi untuk memenuhi hak mereka.